

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK) TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PENULISAN HUKUM**



**Oleh:**

**Ongky Dwi Widya Anggara**

**201210110311243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2018**

## **PENULISAN HUKUM**

# **ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh:

**Ongky Dwi Widya Anggara**

**201210110311243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2018**

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Diajukan Oleh:

**ONGKY DWI WIDYA ANGGARA**

**201210110311243**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 30 Januari 2018

Pembimbing Utama,

  
**Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Dekan,

  
**Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ONGKY DWI WIDYA ANGGARA**

**201210110311243**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 30 Januari 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

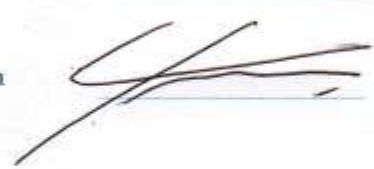
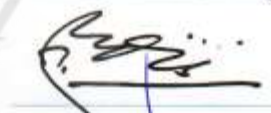
## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Sekretaris : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum.

Penguji I : Dr. Haris, SH. MH.

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Hum





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ONGKY DWI WIDYA ANGGARA

NIM : 201210110311243

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Januari 2018



  
**Ongky Dwi Widya Anggara**

## MOTTO

***"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini, Sholawat dan Salam tercurahkan baginda Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim. hingga sampai saat ini juga, penulis bisa merasakan indahnya islam dan manisnya iman. Hidup dan Matiku hanya untuk Allah SWT.

Penyelesaian Skripsi ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan secara khusus ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang tua tercinta, beliau telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, maupun dalam kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, pada kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Drs. Fauzan, M.Pd, selaku motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Haris, S.H., M.H, dan Bapak Said Noer Prasetyo, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan III, serta Bapak Bayu Dwi Widdy Djatmiko, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum.
3. Bapak Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. Sebagai Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Sidik Sunaryo, S.H., MH. Sebagai Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, melalui bimbingan dan saran-saran

konstruktif penulis banyak menimbah ilmu dalam proses konsultasi dan penyempurnaan skripsi penulis.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat sebutkan satu Persatu dalam skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat didunia dan akhirat amin, jasa-jasa beliau tiada batasnya.
5. Kawan- kawanku seperjuangan angkatan 2012 dan masih banyak penulis tidak bisa menyebutkan, terimakasih telah menjadi teman yang baik selama ini.

Segala bentuk kekurangan dalam tugas akhir ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua.

Penulis

Ongky Dwi Widya Anggara



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode pendekatan .....	8
2. Jenis Bahan Hukum .....	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
4. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Sejarah Penyadapan oleh KPK .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Penyadapan .....	15
1. Pengertian Penyadapan.....	15
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan .....	18
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	25
2. Jenis-Jenis Korupsi .....	31

D. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia .....	37
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	37
2. Kategori Hak Asasi Manusia .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Kewenangan Penyadapan KPK dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Berdasarkan UU ITE dan UU KPK .....	45
1. Pengaturan Penyadapan dalam UU ITE .....	45
2. Pengaturan Penyadapan dalam UU KPK .....	50
B. Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP .....	62
1. Penyadapan dalam RUU KUHAP .....	62
2. Pengaturan Ideal Penyadapan oleh KPK .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Pengaturan Penyadapan dalam UU ITE.....	48
Tabel 2 :	Pengaturan Penyadapan dalam UU KPK.....	55
Tabel 3 :	Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP.....	64
Tabel 4 :	Perbandingan materi penyadapan dalam UU ITE, UU KPK dan RUU KUHAP.....	67



## REFERENSI

- Andwika, Rizky *Ini Kasus Kakap Yang Dibongkar KPK Dari Hasil Penyadapan*, diakses dari <https://www.merdeka.com/> pada tanggal 30 April 2017.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KBBI online, diakses dari <http://kbbi.web.id/> diakses pada 30 April 2017.
- Kompas.com, Anggodo Widjojo: *Mereka yang Menjadi Perantara (Duit Miliaran)* (2). Dikases dari <http://nasional.kompas.com> pada 19 November 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kristian, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sulistyanto, Joko. 1997. *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suwitri, Sri. 2007. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.
- Suhendi, Adi. *182 Kasus Suap yang Dibongkar KPK Sebagian Besar Berasal dari Penyadapan*, Diakses dari <http://www.tribunnews.com> pada tanggal 30 April 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Rancangan Undang-Undang KUHAP tahun 2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUU-I/2003 PUU-I/2003
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-VIII/2010